

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Saya memilih judul ini karena saya ingin mengetahui sejauh mana peran ASEAN dalam menghadapi masalah internal di antara anggota ASEAN. Dan saya ingin mengetahui bagaimana ASEAN mampu menyelesaikan masalah tersebut, cara ASEAN menyelesaikan konflik antar anggota negara tersebut dan bagaimana prosesnya.

B. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan membahas tentang peran ASEAN dalam penyelesaian konflik sengketa perbatasan Thailand-Kamboja pada tahun 2008. Negara Thailand dan Kamboja adalah negara yang awalnya memiliki hubungan baik. Di kedua negara tersebut hampir tidak pernah terlibat pertikaian, karena kedua negara tersebut mempunyai banyak persamaan salah satunya adalah persamaan Agama Budha yang menjadi agama mayoritas kedua negara tersebut. Adapun persamaan lain karena kedua negara tersebut sama sama menganut sistem pemerintahan Monarki Absolut. Tetapi masalah perebutan itu muncul selepas terjadinya konflik Perang Indochina pada tahun 1945. Perang Indochina adalah perang yang terjadi karena adanya perbedaan ideologi, sebenarnya perang ini terjadi antara negara

Perancis dengan Vietnam tetapi perang ini juga mempengaruhi sengketa antara Thailand dan Kamboja. Adanya sengketa perbatasan tanah yang membuat kedua negara ini semakin menggebu-gebu dengan konflik perebutan wilayah.

Selepas Perang Indochina tersebut kedua negara ini semakin merenggang, terlebih lagi dimana soal perebutan sengketa tanah. Dalam konflik sengketa tanah ini dimana ada satu kuil yang berdiri di atas tanah yang bersengketa. Sejak dahulu masalah perebutan ini sudah hangat di perbincangkan. Kuil ini sudah berdiri kurang lebih 900 tahun, sekitar 8 abad yang lalu dan pada saat itu pula UNESCO sudah menetapkan kuil itu sebagai salah satu Warisan sejarah dunia.¹ UNESCO adalah singkatan dari kata United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. UNESCO merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, dan HAM. UNESCO merupakan organisasi yang memajukan antar negara dan merupakan organisasi yang membuat keputusan kepemilikan untuk wilayah teritory. Keputusan UNESCO ini yang membuat kedua reaksi negara tersebut. Kedua negara tersebut menjadi semakin memanas dan kemudian negara Thailand dan Kamboja meletakkan Pasukan Tentara masing-masing negara di daerah sengketa tepatnya di Kuil Preah Vihear. Ini di buktikan dengan berita saat pesawat tentara militer negara Thailand

¹*Konflik Thailand-Kamboja* <https://www.scribd.com/doc/29233196/Konflik-thailand-kamboja-doc> di akses pada tanggal 3 April 2016 pukul 10.00.

terbang di wilayah kuil Preah Vihear.² Ketegangan di perbatasan meningkat menyusul rencana vonis oleh pengadilan tinggi PBB tentang batas wilayah di sekitar kuil kuno perbatasan.

Masalah kepemilikan ini yang memicu terjadinya sengketa yang kemudian berlanjut dengan konflik bersenjata di wilayah tersebut. Konflik bersenjata antara tentara dari kedua Negara ini di kabarkan menimbulkan korban jiwa, dimana telah menewaskan tiga tentara Kamboja dan empat tentara Thailand luka luka. Hal ini membuat warga Kamboja marah dan kemarahan warga Kamboja menyebabkan Kedutaan Negara Thailand dan beberapa usaha milik warga Thailand dibakar dan di jahar oleh warga Kamboja di Phnom Penh. Klaim kuil Preah Vihear yang menjadi momok permasalahan dari sengketa perebutan salah satu sejarah warisan dunia ini karena Kamboja menggunakan peta wilayah yang di buat oleh bangsa Perancis pada tahun 1907 dan Thailand menggunakan peta wilayah pada tahun 1904.³ Kedua negara tersebut memperebutkan sengketa tanah tersebut dan kuil yang terbangun di atas tanah tersebut karena kuil tersebut memiliki sumber daya alam mineral, minyak bumi dan gas alam kuil tersebut juga menjadi tujuan pariwisata turis-turis asing, dan itu dapat menaikkan perekonomian suatu negara jika salah satu tempat di jadikan pusat pariwisata.

Ketika kasus tersebut di bawa kepada International Court of Justice (ICJ) pada tahun 1962, pihak Kamboja dinyatakan berhak atas wilayah kuil tersebut. ICJ

²*Thailand dan Kamboja kembali tegang* http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/11/131109_ di akses pada tanggal 4 April 2016

³*Konflik Thailand dan Kamboja* <http://dokumen.tips/documents/konflik-an-thailand-dan-kamboja-.html> di akses pada tanggal 3 April 2016 pukul 11.00

adalah organisasi peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peran ICJ adalah untuk menetapkan, sesuai dengan hukum internasional, sengketa hukum diserahkan kepadanya oleh Negara dan negara memberikan pendapat dan nasehat tentang pertanyaan hukum yang disebut dengan hukum resmi organisasi PBB dan badan-badan khusus. Keputusan dari ICJ ini ditolak keras oleh Thailand yang tetap mempertahankan klaimnya. Sejak saat itu konflik perbatasan antara kedua negara berlangsung hingga saat ini. Seperti yang di tafsirkan oleh ICJ mereka mengatakan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan di area sekitar kuil Preah Vihear, dan sebagai konsekuensinya, Thailand berkewajiban untuk menarik pasukan militer yang telah di letakan oleh Thailand di daerah sekitar kuil. Ini di lansir dalam siaran pers ICJ.⁴ Keputusan ICJ ini hanya menafsirkan dan menegaskan putusan dalam kasus sengketa ini pada tahun 1962, saat itu negara Thailand menilai keputusan tersebut hanya menyangkut kepemilikan kuil, bukan kepemilikan area di sekitar kuil tersebut.⁵ Ini yang menimbulkan konflik ini semakin memanas.

Negosiasi telah di lakukan oleh kedua pihak negara yang bersengketa yaitu negara Thailand dan Kamboja dan telah ada kata sepakat untuk kepemilikan kuil Preah Vihear, dan pada tahun 1962 kedua belah pihak memutuskan untuk membawa masalah ini kepada MI (Mahkamah Internasional). MI membuat keputusan bahwa negara Kamboja yang berhak memiliki kuil tersebut. Tetapi masalah ini masih berlangsung karena MI belum memutuskan kepemilikan tanah

⁴*Sengketa Kuil, Kamboja kalahkan Thailand di Mahkamah Internasional* www.hukumonline.com/ di akses pada tanggal 3 April 2016

⁵ Ibid

sekitar 4,6 kilometer persegi di sekitar kuil, sehingga konflik tetap berlangsung pada tahun 2008.⁶ Negara Thailand dan Kamboja masih menggunakan garis batas dan peta yang berbeda untuk mengklaim daerah di sekitar kuil Preah Vihear. Kamboja dan Thailand setuju membangun kuil Preah Vihear untuk tujuan pariwisata dan akan membentuk Komisi Gabungan untuk perkembangan daerah Preah Vihear.⁷

Karena permasalahan yang semakin berlarut-larut, tentara dari masing-masing negara yang ditempatkan di daerah kuil di tarik. Penarikan mundur tentara ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Keadilan Internasional, ICJ, untuk meredakan konflik selama beberapa tahun belakangan. ICJ memutuskan agar militer kedua belah pihak ditarik secara menyeluruh dan bersamaan dari kawasan seluas 17,3 kilometer persegi di sekeliling Kuil Preah Vihear, yang ditetapkan sebagai kawasan demilitarisasi. Sebagai gantinya, polisi kedua negara yang dikerahkan di kedua perbatasan.⁸ Diadakannya pertemuan untuk mengadakan perundingan membahas tentang pembukaan jalur perbatasan antara negara Thailand dan Kamboja di sekitar kuil. Perbatasan ini memisahkan wilayah Provinsi Sa Kaeo, Thailand selatan dan Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja.⁹ Adapun dampak dari konflik ini adalah kurangnya rasa saling kerja sama antar negara Anggota ASEAN, seharusnya ASEAN sebagai organisasi yang

⁶ Djelantik, Sukawarsini, 2015, 'Asia Pasifik, konflik, Kerja Sama, dan Relasi AntarKawasan'.

⁷Ibid.

⁸*Tentara di Tarik dari perbatasan Kamboja-Thailand*

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120718_tentara di tarik dari perbatasan Kamboja-Thailand.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120718_tentara_di_tarik_dari_perbatasan_kamboja-thailand.shtml) di akses pada 3 April 2016

⁹*Thailand-Kamboja Berunding Masalah Perbatasan* News.okezone.com/thailand-kamboja-berunding-masalah-perbatasan. Di akses pada tanggal 3 April 2016

beranggotakan sepuluh negara ini dapat menjalin kerjasama yang baik antarkawasan di Asia Tenggara.

Tujuan utama ASEAN adalah untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Sebagai suatu organisasi regional, ASEAN harus membantu menyelesaikan sengketa antar anggota ASEAN. ASEAN terus tumbuh dan berkembang sebagai suatu organisasi yang semakin solid. Dari suatu organisasi yang longgar, ASEAN tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang berdasarkan hukum seperti tercermin dari diratifikasinya Piagam ASEAN pada akhir tahun 2008. Selain Piagam ASEAN, negara-negara ASEAN juga memiliki Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*) yang ditandatangani di Bali tahun 1976.

Dalam permasalahan kali ini dalam sengketa wilayah yang di dalamnya terdapat kuil yang sudah di tetapkan sebagai salah satu warisan dunia maka Negara Kamboja lah yang melaporkan masalah ini ke dalam DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa). Bersama dengan Menlu Thailand dan Kamboja, Menlu Marty (ketua ASEAN dari Indonesia) ke New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan. Alasan Menlu Marty menjak pertemuan kedua Negara ke New York karena ASEAN ingin meminta bantuan kepada PBB. Dalam permasalahan ini, Thailand ingin menyelesaikan kasus ini dengan cara bilateral, tetapi Negara Kamboja juga ingin penyelesaian konflik ini di internasionalisasikan. Untuk menghormati prinsip-prinsip dalam *Treaty of*

Amity and Cooperation (TAC) termasuk penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik, ternyata masih terbatas pada pernyataan di atas kertas. Keterlibatan tim observer Indonesia atas nama ASEAN di perbatasan Kamboja dan Thailand pun belum terwujud karena adanya penolakan dari pihak militer Thailand. Thailand tidak mentaati norma yang sudah terkandung dalam ASEAN karena Thailand mengklaim bahwa kepemilikan kuil Preah Vihear adalah milik Thailand. Dalam kasus ini, jika suatu keinginan tidak dapat di capai, maka segala cara akan tetap di lakukan meskipun harus melanggar aturan yang sudah di tetapkan. ASEAN juga kurang tegas dalam menanamkan sikap taat aturan kepada anggota-anggota ASEAN.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana peran ASEAN dalam menyelesaikan sengketa perbatasan Thailand-Kamboja pada tahun 2008 ?

D. Tujuan Penelitian

Mengetahui peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa kuil Preah Vihear pada tahun 2008-2011.

E. Teori

Mazhab Inggris

Mazhab Inggris bisa di sebut juga realis-liberalisme karena dua pandangan realis dan liberalism dijadikan satu. Teori yang di hasilkan oleh Mazhab Inggris ini banyak di gunakan untuk menganalisis tentang masyarakat internasional sebagai obyek utamanya, antara lain Hedley Bull, Martin Wight, John Vincent, Adam Watson, Robert Jackson, Tim Dunne, dan lain-lain. Mazhab Inggris memiliki asumsi bahwa terdapat *society of states* dalam level internasional karena pada dasarnya hubungan internasional merepresentasikan masyarakat-masyarakat negara tersebut. Mazhab Inggris menyatakan bahwa 'masyarakat negara' eksis di tingkat internasional meski berada dalam keadaan anarki (ketiadaan pemimpin global atau negara dunia).¹⁰ Mazhab Inggris muncul sebagai reaksi terhadap dua perspektif klasik, realisme dan liberalisme. Mazhab Inggris di katakan juga menjadi pendekatan besar karena melalui pendekatan ini kita dapat mengerti bagaimana masyarakat internasional itu. Kekuatan utama pendekatan masyarakat internasional untuk mempelajari hubungan internasional adalah kelengkapannya, dan sifatnya yang dapat di argumentasikan, yang di akibatkan dari keterbukaan dan sifatnya yang mudah menerima sampai point pendekatan lain yang kuat, terutama realis dan liberalis.¹¹

¹⁰'Mazhab Inggris dalam Huubungan Internasional'[http://id.unionpedia.org/i/Mazhab_Inggris_\(hubungan_internasional\)](http://id.unionpedia.org/i/Mazhab_Inggris_(hubungan_internasional)) di akses pada 25 Oktober 2016

¹¹Serensen, Georg dan Robert Jackson, 2013 : Introduction to International relations: Theories And Approaches, Fifth Edition : Oxford University Press

Menurut Mazhab Inggris ini di jelaskan bagaimana cara masyarakat internasional memperlakukan masyarakat yang lainnya. Mazhab Inggris bersangkutan dengan norma dan kehidupan social. Masyarakat internasional menurut Hedley Bull negara berbagi satu kepentingan yang sama dan menurut pendapatnya adalah bahwa sekelompok negara (sekelompok komunitas politik independen) tidak hanya membentuk sebuah sistem, yang artinya perilaku setiap negara merupakan faktor penting dalam menilai suatu perilaku negara lain, tetapi juga menetapkan peraturan dan lembaga atas dasar dialog dan niat untuk mengatur hubungan mereka, dan mengakui adanya kepentingan bersama dalam mengelola peraturan dan lembaga tersebut. Hadley Bull adalah seorang dosen hubungan internasional di Universitas Nasional Australia, London School of Economics, dan Universitas Oxford. Menurutnya, di dalam sekelompok Negara-negara adanya norma bersama yang di jalankan, Negara-negara di dalam ASEAN di ikat oleh suatu norma yang dimana norma adalah sebagai perekat society. Menurut pandangan konstruktivisme, teori norma sangat penting dan independent didalam pengambilan kebijakan luar negri. Dalam pandangan konstruktivis ini lah perilaku actor sangatlah di pengaruhi oleh norma.

Menurut pandangan Martha Finnemore yang seorang konstruktivis yang mengamati bagaimana cara norma-norma berjalan dan mempengaruhi identitas-identitas dan kepentingan-kepentingan.¹² Seorang konstruktivis Martha Finnemore melengkapi pandangan Mazhab Inggris mengenai norma. Norma bisa di katakan sebagai nilai yang menjadi pertimbangan dalam perilaku. Dalam hubungan internasional, norma menjadi pertimbangan kebijakan sebuah Negara (meskipun seringkali di abaikan dalam kebijakan sebuah Negara). Norma bisa menjadi aturan dalam hubungan internasional, jika masyarakat internasional atau Negara-negara menjadikan nilai-nilai tertentu sebagai aturan atau ketentuan yang dapat di paksakan, dalam bentuk hukum internasional maupun perjanjian internasional. Norma di katakan sebagai cara manusia untuk mengarahkan perilaku kedalam hal yang baik. Jika norma di langgar oleh masyarakat maka, masyarakat tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan menjadi aturan.

Dalam masyarakat internasional, lebih mendekati ke kompleksitas empiris hubungan internasional, dan untuk mendapatkan apresiasi yang lebih mendalam tentang dilemma normatif dan kesulitan kewarganegaraan, kebijakan luar negri, dan hubungan diplomatik.¹³ Menurut Martin Wight terdapat tiga tradisi dari teorisasi klasik hubungan internasional dan masuk kepada tiga kategori dasar realis, rasionalis, dan revolusionis.¹⁴

- Kaum realis lebih menekankan pada aspek “anarki international”.

Realism adalah doktrin bahwa persaingan dan konflik antara negara

¹² Norma dalam pandangan Konstruktivis http://www.portal-hi.net/norma-dalam-pandangan-konstruktivisme/#_ftnref1 di akses pada 25 Oktober 2016

¹³ Ibid.

¹⁴ Wight, Martin. 1991. *International Theory: The Three Traditions*. Leicester: Leicester University Press.

bersifat ‘inheren’. Kaum realis masih menekankan ‘elemen anarki’, politik kekuasaan dan peperangan.

- Kaum rasionalis adalah kaum yang menekankan pada aspek berdialog dan pergaulan internasional. Kaum rasionalis memandang bahwa manusia masuk akal apa yang harus di lakukan dan apa yang tidak patut untuk di lakukan, dan manusia dapat belajar mengenai kesalahan atas apa yang telah di perbuat oleh orang lain.¹⁵ Kaum rasionalisme menekankan pada masyarakatnya dan memandang masyarakat itu mempunyai harapan untuk menjadi lebih baik kedepannya.
- Kaum revolusionis lebih menekankan pada aspek ‘persatuan moral’ manusia. Revolusionisme adalah faktor penggerak. Kaum revolusionisme mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan pemenuhan manusia yang bersifat universal, mereka percaya pada kesempurnaan manusia. Ketika revolusi akan tercapai, mereka berpendapat bahwa manusia adalah satu-satunya masyarakat nyata di muka bumi ini yang akan menjadikan peradaban manusia.

Jika kita hidup di lingkungan internasional maka kita harus mematuhi norma-norma yang ada. Norma ASEAN tertuang dalam prinsip-prinsip mahzab Inggris dan beberapa indikasi yang ada yaitu : 1) Saling menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas semua wilayah bangsa, 2) Setiap negara berhak memelihara kedaulatannya dari campur tangan, subversi, kekerasan dari pihak luar, 3) Tidak mencampuri urusan dalam negara lain, 4) Menyelesaikan perbedaan

¹⁵ Ibid.

pendapat dan pertikaian dengan jalan damai, 5) Menolak ancaman menggunakan kekerasan. Seperti halnya pada peran ASEAN di sini karena ASEAN punya norma-norma yang tidak boleh di langgar oleh anggota-anggotanya maka harus di patuhi walaupun ada sengketa atau baku hantam sekalipun, maka dengan norma dapat mengurangi cara pandang dan perilaku manusia. Dengan adanya norma di ASEAN yaitu ASEAN way maka perilaku Negara-negara di kawasan Asia Tenggara di pengaruhi norma-norma yang ada. ASEAN membuat peraturan dan mempunyai norma-norma yang harus di jalankan oleh anggota ASEAN itu. Norma-norma bersama yang dapat di sebut dengan anarki society yang ada akan mengatur bagaimana hubungan kedua Negara yang bersengketa dan menjadikan kedua Negara damai kembali.

ASEAN menegakan norma karena menurut ASEAN sendiri, norma itu suatu aturan yang di sepakati dan masyarakat internasional. Dalam ASEAN semua harus tunduk dan taat kepada norma tersebut. Norma itu penting di suatu negara karena norma adalah suatu etika kepantasan yang harus di junjung tinggi. Dalam halnya ASEAN menengahi sengketa ini karena negara Thailand dan Kamboja yangmana adalah negara anggota ASEAN dan ASEAN harus menangani masalah internal di dalam keanggotannya dan selalu berada di belakang para anggotanya dalam menghadapi masalah. Dalam konflik ini ASEAN melakukan berbagai cara untuk menyudahi konflik di antara negara anggota ASEAN tersebut.

ASEAN menjadi mediator aktif dalam sengketa Thailand-Kamboja ini melakukan pertemuan menlu ASEAN dan menawarkan solusi untuk kedua negara untuk saling berdamai. ASEAN pernah menghadapi masalah internal antara

anggotanya, untuk menentukan modalitas perundingan dan menentukan apakah pembahasan perlu dibawa ke pertemuan High Council seperti yang disebutkan dalam Piagam ASEAN.¹⁶

F. Hipotesa

1. Peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik sengketa perbatasan Thailand-Kamboja pada tahun 2008 adalah menjadi mediator aktif dan menawarkan solusi bagi kasus sengketa di kedua belah pihak.
2. Peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik juga menekankan peran norma ASEAN yang menolak penggunaan kekerasan di dalam sengketa Thailand-Kamboja dan menggunakan pendekatan dengan cara diplomasi untuk mencapai perdamaian.

G. Metode Penelitian

Penelitian yang saya ambil berasal dari buku, Jurnal, website dan sumber-sumber terpercaya seperti pandangan para ahli dan berita-berita. Menggunakan metode kualitatif karena data yang saya ambil bersifat kepustakaan tidak dalam hitungan. Saya menggunakan data Primer dan data sekunder karena data yang saya ambil langsung dari buku para ahli tetapi juga ulasan dari para narasumber. Saya akan mencoba menganalisa tentang konflik tersebut menjadi sebuah informasi.

¹⁶ *'Penyelesaian Konflik Thailand dan kamboja'*
<http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja> di akses pada tanggal 16 November 2016

H. Sistematika Penulisan

Bab 1 membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, teori hipotesa, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab 2 membahas tentang sejarah dan dinamika sengketa Thailand dengan Kamboja. Di bahas dengan sejarah di kedua negara dan lebih kedalam letak geografis di kedua negara dan bagaimana sengketa itu berlangsung, dan bagaimana hubungan antara kedua negara, dari awal mula sengketa hingga selesai.

Bab 3 membahas tentang dampak norma ASEAN dalam konflik bilateral Thailand-Kamboja dan bagaimana norma itu berperan dalam sengketa di kedua negara tersebut. Dalam bab ini akan di jelaskan bagaimana berdirinya norma dan di tegakannya norma di ASEAN dan norma ASEAN sebagai *Guiding Principles*.

Bab 4 membahas tentang upaya ASEAN sebagai mediator dalam sengketa Thailand-Kamboja. Bagaimana awal mula berdirinya ASEAN sebagai mediator sampai cara menyelesaikan sengketa antar kedua negara.

Bab 5 membahas tentang kesimpulan di dalam bab II,III, dan IV